

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemenangan calon walikota petahana dipengaruhi faktor politisasi birokrasi yang dilakukan elite birokrasi, sebagai tim pemikir dan tim lapangan berperan besar melakukan kegiatan politik berupa sosialisasi, konsolidasi, fasilitasi, mobilisasi serta pengamanan dukungan. Selain itu elite birokrasi berperan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan politik yang melibatkan tim sukses dalam kerja-kerja pemenangan di lapangan.

Peran tersebut sangat membantu kelangsungan proses politik petahana selama tahapan pilkada berlangsung, sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan politik, elite birokrasi ikut berpartisipasi dengan mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai kebutuhan logistik tim sukses dan operasional posko pemenangan Burhan-Abdullah di wilayah kerja tim elite. Berpartisipasi membiayai kegiatan kampanye dan biaya akomodasi saksi pada sidang sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedudukan sebagai pejabat birokrasi yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan mengelola anggaran serta program pemerintah, memudahkan tim elite birokrasi melakukan komunikasi dan memfasilitasi rekanan/mitra strategis guna berpartisipasi membantu biaya politik calon walikota Burhan Abdurahman. Menggunakan fee proyek dari setiap kegiatan untuk membantu anggaran kegiatan politik petahana selama proses pilkada berlangsung, dan memanfaatkan program

pemerintah untuk mendapatkan dukungan masyarakat serta pencitraan politik yang positif dihadapan publik.

Tim (elite birokrasi) terdiri dari pimpinan SKPD yang menyatakan mendukung petahana, dan memiliki hubungan emosional (kekerabatan dan etnis) dengan kandidat. Tim ini berperan menyusun strategi pemenangan, konsolidasi dan mobilisasi masa. Sedangkan tim lapangan terdiri dari kepala bidang, pimpinan kecamatan, lurah, dan staf biasa yang melakukan rekrutmen tokoh masyarakat dan konsolidasi massa di tingkat bawah.

Para pimpinan SKPD bertanggung jawab penuh terhadap dukungan dan mobilisasi pegawai di setiap unit kerja, hal yang sama berlaku untuk lurah, camat, serta pimpinan jabatan struktural lainnya. Terkait konsolidasi dan mobilisasi masa, tim elite birokrasi dan tim lapangan memanfaatkan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Merealisasikan permintaan kelompok komunitas masyarakat yang bersifat bantuan barang, biaya kegiatan, dan kebutuhan lainnya. serta mendatangi masyarakat menyampaikan dan menunjukkan keberhasilan calon walikota petahana selama menjabat periode pertama Walikota Ternate.

Faktor *Patron Client* menjadi bagian dari dukungan elite birokrasi terhadap pencalonan petahana, terdapat pimpinan SKPD yang memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan kandidat, selain itu sebanyak 13 pimpinan SKPD, 2 camat dan beberapa lurah yang memiliki kesamaan etnis dengan calon walikota petahana (etnis Tidore). Faktor balas budi elite birokrasi terhadap petahana menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sikap loyalitas yang

ditujukan buat petahana. Mereka yang mendapatkan jabatan karena faktor profesionalisme menjadi bagian dari tim sukses birokrasi.

Kompensasi jabatan sangat terkait dengan komitmen dan keberanian petahana mempertahankan elite birokrasi yang telah bekerja sebagai tim sukses. Tidak terjadi perombakan kabinet secara besar-besaran, terdapat tim elite birokrasi yang bertahan di jabatan sebelumnya dan beberapa mendapat promosi jabatan. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal tanpa adanya protes/gejolak dari tim sukses terkait belum terakomodir dalam penempatan jabatan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Ternate.

Keterlibatan elite birokrasi di Pilkada Kota Ternate menghasilkan banyak pelanggaran, berdasarkan hasil kajian Panwas Kota Ternate merekomendasikan memberikan teguran keras terhadap pelaku pelanggaran. Hal yang sama dilakukan oleh pejabat walikota menindak elite birokrasi yang terlibat politik praktis. Menghindari adanya pelanggaran dan teguran dari pengawas pemilu dan pimpinan, tim sukses birokrasi dalam menjalankan kerja-kerja politik dilakukan secara tertutup baik itu kegiatan koordinasi, komunikasi, pertemuan dan mobilisasi massa. Serta melibatkan orang kepercayaan untuk mendorong isu/opini publik dan melakukan eksekusi anggaran yang menguntungkan petahana.

VI.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diajukan beberapa saran sebagai langkah perbaikan untuk kepentingan praktis dan akademis, di antaranya sebagai berikut :

1. Ke depan pembahasan Undang-undang Pemilihan kepala daerah, secara tegas mengatur sanksi keterlibatan ASN dalam Pilkada dan keterlibatan petahana dalam mobilisasi birokrasi. Sanksi pemecatan ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dan diskualifikasi pasangan calon, sehingga memberikan efek jera terhadap birokrasi dan kepala daerah.
2. Perlu memperkuat kewenangan Pengawas Pemilu (Panwas dan Bawaslu) terkait tugas dan kewenangan menindak pelanggaran Pilkada yang dilakukan ASN dan calon kepala daerah, dengan demikian pemberian sanksi dilakukan satu lembaga yakni penyelenggara pemilu.
3. Perlu adanya regulasi yang mengatur larangan penempatan pejabat eselon II di lingkungan kerja pemerintah daerah yang bebas dari konflik kepentingan dengan kepala daerah aktif. Penempatan pejabat harus bebas dari hubungan darah dan dominasi etnis tertentu, ini dilakukan untuk memperkecil ruang politisasi birokrasi.
4. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji politisasi birokrasi atau dukungan birokrasi berdasarkan politik balas budi di lingkungan pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem seleksi terbuka pejabat birokrasi. Mengkaji sejauh mana profesionalisme ASN tidak berpengaruh pada suksesi kekuasaan, penawaran jabatan, dan kehilangan pejabat pasca-Pilkada.

